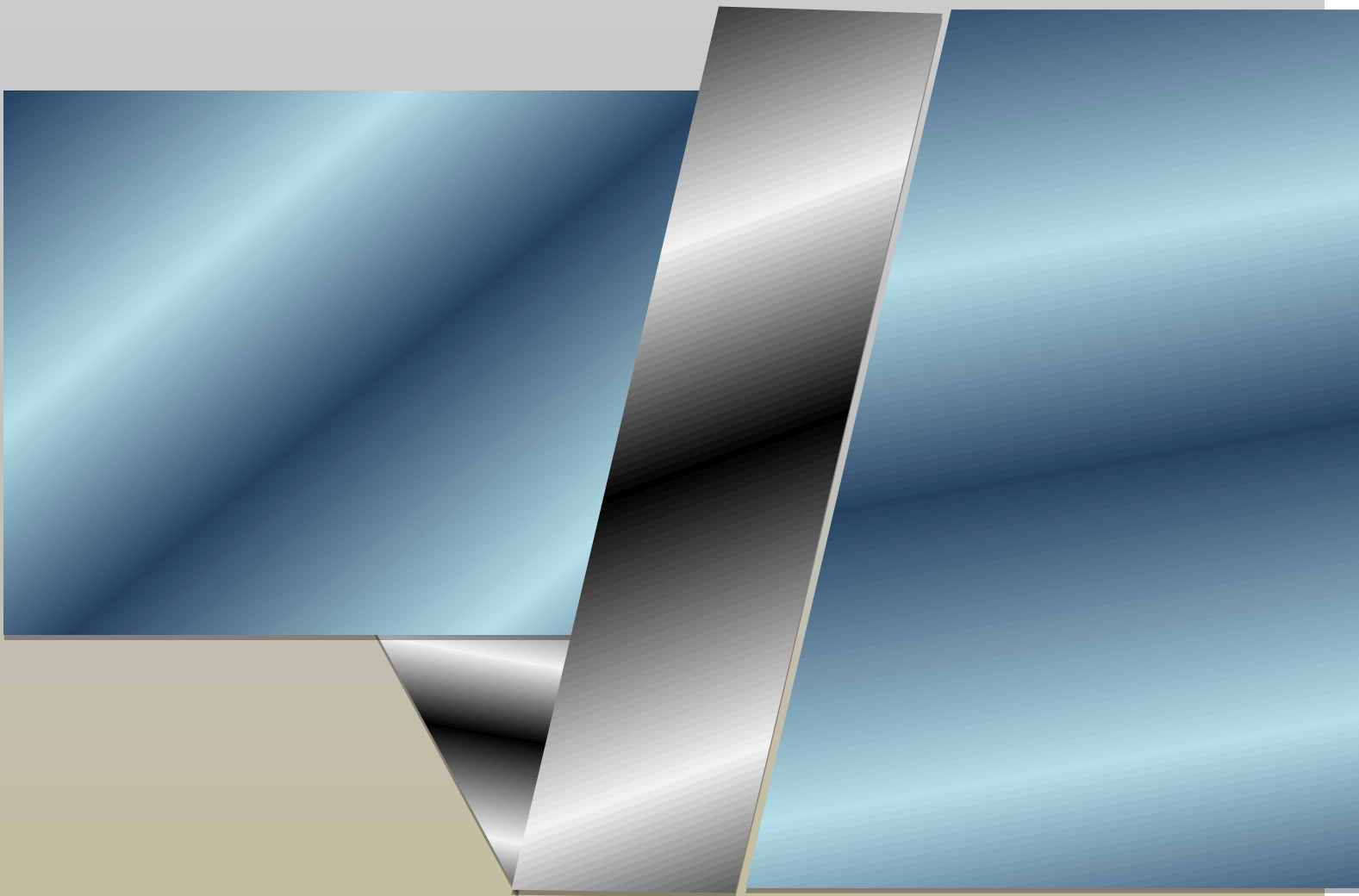


RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2020 - 2024



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA

KATA PENGANTAR

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional mengamanatkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan BNN untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja.

Untuk menuju akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan jangka menengah yang memuat kerangka program, kegiatan, target, indikator keberhasilan, hingga pembiayaan serta regulasi yang komperhensif.

Kerangka kinerja tersebut kami tuangkan ke dalam sebuah dokumen Rencana Program dan Kinerja BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2020 – 2024. Dokumen Renproja tersebut secara spesifik akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi wilayah Jakarta Utara dari segala dimensi. Program dan kegiatan juga menjadi titik penjabaran secara mendalam. Anggaran dan regulasi dalam pencapaian indikator target akan dikupas secara detail.

Dengan adanya dokumen Renproja ini diharapkan dapat menjadi *guidance* bagi BNN Kota Jakarta Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 – 2024 mendatang. Sehingga tidak hanya *out put* saja yang tercapai akan tetapi pencapaian *out come* dan aspek manfaat yang dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Jakarta Utara



Bambang Yudistira, S.Sos., M.Si

BAB I

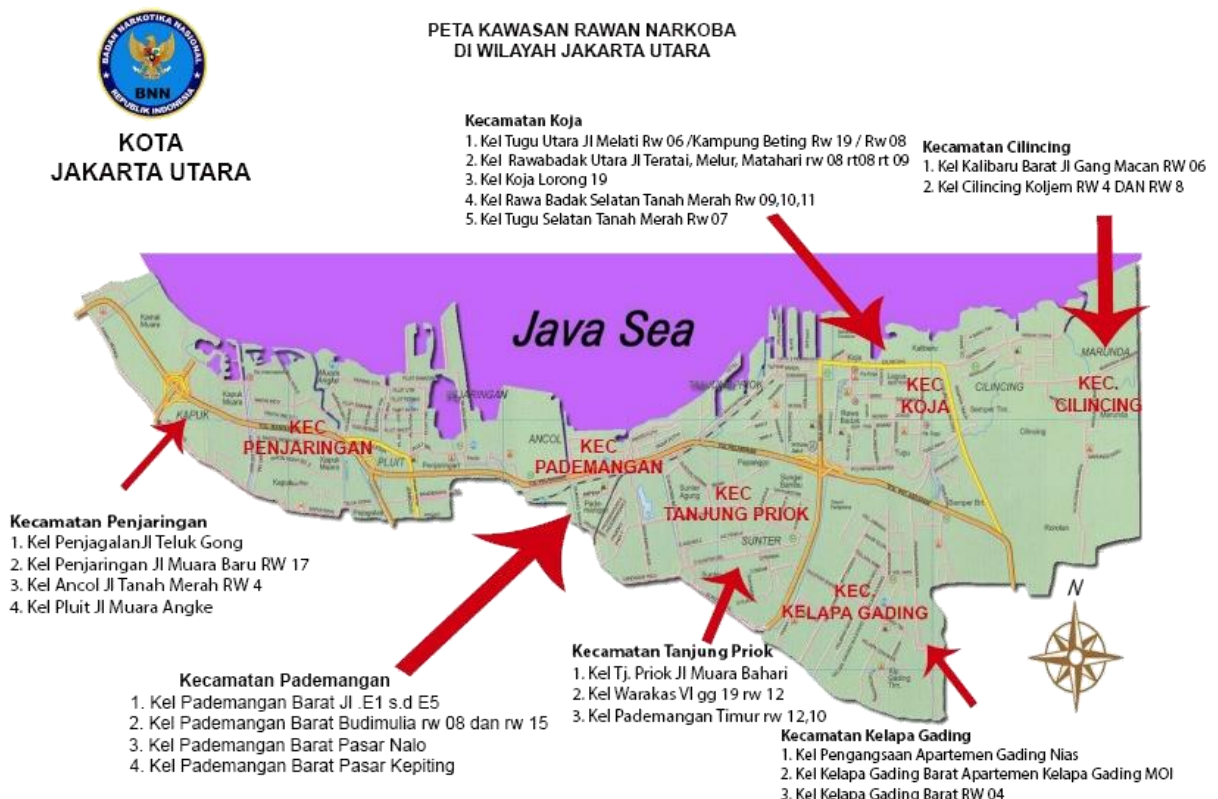
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kota Jakarta Utara menjadi permasalahan serius yang perlu diberantas dan ditangani secara komprehensif, mengingat Jakarta Utara memiliki dua Pelabuhan besar dan berbatasan langsung dengan wilayah Kepulauan Seribu yang memungkinkan Jakarta Utara menjadi tempat transit atau jalur peredaran narkoba.

1. Kawasan Rawan di wilayah Jakarta Utara

Terdapat 21 (dua puluh satu) wilayah Kawasan rawan di Jakarta Utara (berdasarkan data pemetaan Kawasan rawan di wilayah Jakarta Utara pada tahun 2020).



Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi stakeholder yang ada di wilayah Jakarta Utara, diantaranya dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor; 228 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim P4GN tanggal 25 Juni 2019 dan Surat Edaran dari Suku Dinas Kepemudaan dan Olahraga No.499/SE/2020 tentang pemasangan Banner/Spanduk di semua fasilitas keolahragaan di Jakarta Utara.

2. Aspek Rehabilitasi

a. Klinik Pratama Wira Dharmesti

Klinik Pratama Wira Dharmesti Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara yang berdiri sejak 1 November 2015 telah memberikan layanan rehabilitasi rawat jalan berupa asesmen, pemeriksaan kesehatan, konseling, terapi kelompok, *family support group*, hingga layanan pascarehabilitasi. Pada tahun 2021 ini Klinik Pratama tercatat telah memberikan layanan rehabilitasi rawat jalan kepada 67 (enam puluh tujuh) klien penyalahguna narkoba. Klien yang telah dilayani ini memiliki profil yang beragam dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, zat yang disalahgunakan, hingga tingkat keparahan adiksi.

Berikut sebaran data klien penyalahguna narkoba yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara :

1) Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki	Perempuan
35	5

2) Berdasarkan Usia

<18 Th	18-25 Th	26-30 Th	31-35 Th	36-40 Th	41-45 Th	>45 Th
1	23	14	8	10	6	1

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PUTUS SEKOLAH	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	PT
0	3	3	29	0	5

4) Berdasarkan Pekerjaan

PELAJAR	MAHASISWA	PNS	SWASTA	WIRASWASTA	TDK BEKERJA
1	4	1	26	3	5

5) Berdasarkan Diagnosis

F12	F13	F15	F19
11	-	29	-

6) Berdasarkan Pola Penggunaan

COBA PAKAI	REKREASIONAL	SITUASIONAL	TERATUR PAKAI	KETERGANTUNGAN
3	18	13	6	0

b. Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

Pada tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menjalin Kerjasama dengan 6 (enam) lembaga rehabilitasi baik Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) maupun Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM). Lembaga rehabilitasi ini sebelumnya telah melalui tahap verifikasi oleh tim verifikator Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara. Verifikasi ini bertujuan untuk menilai kelayakan dan kelengkapan pemenuhan syarat standar pelayanan minimal serta rekam jejak lembaga dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkoba. Perjanjian Kerjasama antara Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dengan 6 (enam) lembaga rehabilitasi yang telah lolos verifikasi disahkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara. Adapun 5 (lima) lembaga rehabilitasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Rumah Sakit Prof. DR. Sulianti Saroso

RSPI ini melayani Program Rehabilitasi Rawat Jalan. RS. Sulianti Saroso berlokasi di Jl. Sunter Permai Raya No. 2 RT: 2 RW:12 Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara.

2) Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading

Lembaga ini melayani rehabilitasi rawat jalan dan berlokasi di Jl. Pelepah Elok Blok HF RT: 04 RW: 07 Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara.

3) Puskesmas Kelurahan Ancol

Lembaga ini melayani rehabilitasi rawat jalan dan berlokasi di Jl. ANcol Barat III No. 2 RW:01 Ancol Pademangan Jakarta Utara.

4) Yayasan Aksi Nusantara

Lembaga ini melayani rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap sosial dan berlokasi di Jl. Kobon Kosong Raya No. 26 Kemayoran Jakarta Pusat.

5) Yayasan Emas Pengharapan

Klinik ini melayani rehabilitasi rawat inap sosial dan berlokasi di Jl. Gading Griya Residence, Jl. Mahoni I B3 No. 72 RT.9/RW.012 Sukapura Cilincing Kota Jakarta Utara.

Kerjasama yang terjalin antara Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dan 5 (lima) lembaga rehabilitasi tersebut di atas dalam bentuk :

- 1) Peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi;
- 2) Bimbingan teknis lembaga rehabilitasi; dan
- 3) Penilaian mutu layanan lembaga rehabilitasi.

c. Data Institusi Penerima Wajib Lapor

Adapun Data fasilitas Institusi Penerima Wajib Lapor yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara:

1. Institusi Penerima Wajib Lapor Kementerian Kesehatan

(Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor)

2. Klinik Pratama Wira Dharmmesti Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara. Melayani rehabilitasi rawat jalan. Berlokasi di Jl. Danau Agung 3 No. 5 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara.

2. DATA SDM DAN SARANA DAN PRASARANA BNN KOTA JAKARTA UTARA

Sejak tahun 2015, BNN Kota Jakarta Utara sebagai salah satu perwakilan BNN di daerah memiliki tugas menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Jakarta Utara. Dalam pelaksanaan tugas tentunya harus diiringi dengan dukungan dari masyarakat Kota Jakarta Utara agar program dapat berjalan dengan baik.

Kedudukan Kantor BNN Kota Jakarta Utara bertempat di Jl. Danau Agung 3 No.5, Sunter Agung, Jakarta Utara dan berstatus Pinjam Pakai. Luas tanah dan bangunan kantor yaitu 762.87 m² dan 1.950 m². Data Barang Milik Negara yang dikelola oleh BNN Kota Jakarta Utara berdasarkan aplikasi SIMAK sampai dengan bulan Juni 2021, terdiri dari 183 Unit dengan Nilai Aset BMN sebesar Rp 1.468.448.727.

Jumlah SDM BNN Kota Jakarta Utara masih belum ideal jika mengacu pada jumlah DSP Satker BNN Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 jumlah personil BNN Kota Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

SDM BNN KOTA JAKARTA UTARA

NO	PERSONIL	JUMLAH	KETERANGAN
1.	ASN/POLRI	16 Orang	4 orang POLRI 12 ASN Organik
2.	PPNPM	11 Orang	Security Driver Pramubakti Petugas Rehabilitasi
TOTAL		27 Orang	

3. KONDISI DEMOGRAFI WILAYAH JAKARTA UTARA

Kota Jakarta Utara berada di Bagian Utara Provinsi DKI Jakarta. Dengan luas 140 km², Kota Jakarta Utara terletak pada 106° 20' 00" Bujur Timur dan 06° 10' 00" Lintang selatan, dengan ketinggian 0 sampai dengan 20 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Jakarta Utara yaitu:

- a. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Jakarta Timur dan Bekasi
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tangerang
- d. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa (Kepulauan Seribu)

Jumlah penduduk kota Jakarta Utara tahun 2019 berjumlah 1.819.958 jiwa, dengan kepadatan 13.234 jiwa/km². Sementara pada tahun 2020, jumlah penduduk Jakarta Utara sebanyak 1.843.537. Di Jakarta Utara terletak beberapa pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan Pelabuhan Sunda Kelapa yang berpotensi sebagai jalur masuk peredaran gelap narkoba melalui jalur laut. Wilayah Jakarta Utara memiliki 6 (enam) wilayah kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan, diantaranya:

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Cilincing	7	• Cilincing • Kalibaru • Marunda • Rorotan • Semper Barat • Semper Timur • Sukapura
Kelapa Gading	3	• Kelapa Gading Barat • Kelapa Gading Timur • Pegangsaan Dua
Koja	6	• Koja • Lagoa

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
		• Rawa Badak Selatan • Rawa Badak Utara • Tugu Selatan • Tugu Utara
Pademangan	3	• Ancol • Pademangan Barat • Pademangan Timur
Penjaringan	5	• Kamal Muara • Kapuk Muara • Pejagalan • Penjaringan • Pluit
Tanjung Priok	7	• Kebon Bawang • Papanggo • Sungai Bambu • Sunter Agung • Sunter Jaya • Tanjung Priok • Warakas
TOTAL	31	

4. CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA

Capaian dan evaluasi kinerja menjadi salah satu instrument untuk mengukur tingkat efektivitas dan produktivitas Satker dalam pelaksanaan anggaran. Capaian tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada periode – periode sebelumnya sehingga nilai kinerja anggaran semakin terukur. Berikut capaian kinerja BNN Kota Jakarta Utara pada tahun 2020.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	7,2%	100%
2	Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	2	2	100%
3	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	1	1	100%
4	Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan Anti Narkoba	8	8	100%
4	Terselenggaranya fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	1	3	300%
		Jumlah klien yang mendapatkan paket layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah	110	172	156 %
		Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah	100	97	97,17%

5	Terselenggaranya fasilitas rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang operasional	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat Yang Operasional	2	2	100%
6	Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah Petugas Pasca yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan	10	10	100%
		Jumlah Klien yang Mengikuti Layanan Pasca Rehabilitasi	40	40	100.00 %
		Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	100	99,11	99,11%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P21)	3	3	100%
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	0	0.00%
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100	0	0.00%
14	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	0	0.00%

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah BNN Kota Jakarta Utara, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kota Jakarta Utara yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

a. Analisis lingkungan internal yaitu :

- Sumber daya yang dimiliki yakni SDM, dana, sarana, fasilitas, struktur dan budaya organisasi
- Strategi yang sedang digunakan dalam mengelola input
- Kinerja yang dicapai saat ini

b. Analisis lingkungan eksternal yaitu :

- Pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan politik sosial, teknologi, ekonomi, dan pendidikan
- Mengamati stakeholder luar yang berpengaruh pada pembuatan kebijakan
- Mengamati kolaborasi yang ada
- Wilayah Jakarta Utara memiliki Pelabuhan dan wisata lokal yang menarik, seperti Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi, sehingga dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Jakarta Utara

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kota Jakarta Utara, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Wilayah Kota Jakarta Utara yang sangat luas
- b. Faktor geografis Jakarta Utara yang memiliki Pelabuhan dan berbatasan langsung dengan Kepulauan Seribu menjadikan Jakarta Utara sebagai daerah yang cukup rawan terhadap perlintasan peredaran gelap narkoba.
- c. Status tanah dan bangunan kantor BNN Kota Jakarta Utara yang masih pinjam pakai dari Pemerintah Kota Jakarta Utara sehingga terbatas dalam akselerasi dan inovasi pembangunan infrastruktur yang digunakan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.
- d. Jumlah sumber daya manusia dan anggaran yang masih jauh dari ideal dalam pelaksanaan program P4GN di wilayah BNN Kota Jakarta Utara.
- e. Jabatan yang diemban di BNN Kota Jakarta Utara seringkali tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
- f. Dengan semakin banyaknya destinasi wisata maka akan menimbulkan potensi tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- g. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan gelap narkoba
- h. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba yang mereka ketahui
- i. Belum adanya laboratorium uji narkoba

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI BNN

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi *supply*, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kota Jakarta Utara sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Kota Jakarta Utara. merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi DKI Jakarta juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kota Jakarta Utara sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Jakarta Utara sebagai berikut:

- a. Penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara demand reduction dan supply reduction.
- b. Mengembangkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
- c. Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang.
- d. Pembentukan tim interdiksi laut yang melibatkan instansi lain dalam hal upaya pengamanan jalur masuk melalui Pelabuhan.
- e. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan Narkoba.

- f. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi *local wisdom* masyarakat Kota Jakarta Utara. Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya penetrasi program – program P4GN.
- g. Pembangunan sektor hubungan masyarakat dan komunikasi public yang friendly, responsive, dan efektif sebagai corong terdepan dalam penyediaan data dan informasi.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Kab/Kota.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi.

Adapun rencana target kinerja BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan di BNN Kota Jakarta Utara tahun 2020-2024 tersebar di seluruh unit kerja BNN Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan di unit kerja BNN Kota Jakarta Utara tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kota Jakarta Utara. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Kota Jakarta Utara secara hierarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Jakarta Utara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Yudistira', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Bambang Yudistira, S.Sos., M.Si

**MATRIK RENCANA KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA
TAHUN 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51%	51%	51%	51%	51%
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	78,67	78,67	78,67	78,67
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
5.	Penguatan Lembaga	Meningkatnya aksesibilitas dan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Rehabilitasi Komponen Masyarakat	kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	operasional					
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	-	-	-	-
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	3 berkas	2 berkas	1 berkas	3 berkas	3 berkas
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba		10	20	20	25	25
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	88	88.5	89	89.5	90
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK		92	92	92	92

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota*

Lampiran

Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara

Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	180.000.000	44.030.000	190.000.000	200.000.000	210.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	48.000.000	65.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	164.677.000	230.930.000	235.000.000	235.000.000	235.000.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	96.931.000	98.500.000	110.000.000	115.000.000	120.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	34.635.000	126.814.000	128.000.000	135.000.000	145.000.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK					
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	232.518.000	13.200.000	120.000.000	150.000.000	180.000.000
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21		65.000.000	65.000.000	85.000.000	100.000.000
8.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba			79.350.000	89.250.000	100.000.000	105.000.000
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	3.250.000	13.255.000	14.525.000	15.525.000	16.525.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	92.180.000	93.93.000	106.170.000	116.170.000	120.170.000

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Informasi dan edukasi melalui pemanfaatan media luar ruang
				Informasi dan Edukasi Melalui Branding Pada Sarana Publik
				Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio lokal/daerah
				Informasi dan Edukasi Melalui Placement TV Lokal
				Dialog interaktif remaja
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba
				Koordinasi dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi di BNNP
				Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa
3.	Pemberdayaan	Angka Indeks Kemandirian	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Rapat kerja teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Peran Serta Masyarakat	Partisipasi		pemberdayaan masyarakat Rapat kerja pemberdayaan masyarakat anti narkoba Rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba Bimbingan teknis penggiat P4GN instansi pemerintah Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine di instansi pemerintah Asistensi Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba Workshop penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba pada sektor kewilayahan Konsolidasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba pada sektor kelembagaan Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat instansi pemerintah Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di instansi pemerintah Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba Rapat kerja pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan swasta Workshop penggiat P4GN dunia usaha/lingkungan swasta Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine di lingkungan swasta Asistensi Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Workshop penguatan kapasitas kepada insan media untuk mendukung kota tanggap ancaman narkoba
				Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan swasta
				Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dunia usaha/lingkungan swasta
				Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba
				Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan masyarakat
				Bimbingan teknis penggiat P4GN lingkungan masyarakat
				Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui tes urin di lingkungan masyarakat
				Pengembangan kapasitas P4GN pada lembaga adat dan komunitas berbasis kearifan lokal
				Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan masyarakat
				Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba
				Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan pendidikan
				Bimbingan teknis penggiat P4GN di lingkungan pendidikan
				Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui tes urine di lingkungan pendidikan
				Konsolidasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba pada lingkungan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				pendidikan
				Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan
				Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	-
				-
				-
				-
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-
				-
				-
				-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Bimbingan teknis fasilitas rehabilitasi
				Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota
				Operasional klinik/fasilitasi rehabilitasi
				Layanan rehabilitasi rawat jalan
				Pendampingan pemulihan
				Layanan SKHPN
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Monitoring dan evaluasi
				Rapat koordinasi IBM
				Pemetaan
				Pembentukan dan operasional unit IBM
				Operasional unit IBM
				Asistensi
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	
6.	Penyidikan	Jumlah berkas perkara	Berkas Perkara Tindak Pidana	Penyelidikan kasus tindak pidana narkoba

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Narkotika	Penyidikan kasus tindak pidana narkotika Koordinasi kegiatan penyelesaian kasus tindak pidana narkotika
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi Penyusunan RKA
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Penyusunan Laporan
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai IKPA BNNK	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi
			Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional Perkantoran